

Analisis Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Mengenai Perkembangan Penganggaran dan Pembiayaan Pemerintah Daerah

Hurian Kamela¹, Ryan Saputra Alam², Dede Puspa Pujia³, Susilowati⁴, Adibah Yahya⁵

¹Universitas Terbuka, Indonesia

²STIE Mulia Pratama, Indonesia

^{3,4}Universitas Tangerang Raya, Indonesia

⁵Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail: hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id¹, ryan@stiemp.ac.id², dede.puspa@untara.ac.id³,
susilowati@untara.ac.id⁴, adibah.yahya@pelitabangsa.ac.id⁵

Article History:

Received: 08 September 2025

Revised: 15 Oktober 2025

Accepted: 31 Oktober 2025

Keywords: *accounting, management, public sector, local budgeting.*

Abstract: *The purpose of this study is to initiate the relationship between the development of local government budgeting and the level of knowledge of students in the Accounting and Management study program. The study focuses on public budgets, changes in laws, performance-based budgeting, and the application of information technology in the budget process. This study employed a quantitative, descriptive-comparative approach. Data were collected through questionnaires distributed to final-year students who had taken courses related to the public sector. In general, the study's results indicate that students possess sufficient knowledge. However, there is a significant difference between accounting and management students: accounting students tend to have a better understanding of concepts and strategies. In comparison, management students tend to have a better understanding of accounting techniques and procedures. Additionally, components of the academic experience and sources of information influence the level of knowledge among respondents. To better prepare students to face challenges in the field of local public finance, this study recommends adopting a practice-based curriculum and incorporating real-world problems into the learning process.*

PENDAHULUAN

Salah satu alat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah anggaran pemerintah daerah. Anggaran ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengawasan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif kepada masyarakat. Sistem penganggaran pemerintah daerah Indonesia telah diperbarui dalam beberapa dekade terakhir.

Salah satu reformasi yang paling signifikan adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi berbasis akrual dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas belanja publik.

Perubahan ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang menempuh pendidikan tinggi di bidang ekonomi, terutama akuntansi dan manajemen. Sebagai calon profesional di masa depan, diharapkan mahasiswa memahami dan memahami dinamika penganggaran publik dan kebijakan fiskal. Mahasiswa program akuntansi dan manajemen harus memahami bagaimana anggaran pemerintah daerah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Ini penting karena banyak lulusan program ini akan bekerja di sektor publik atau memberikan layanan profesional kepada lembaga pemerintah. Rowanda & Suriadi (2025) membahas mengenai perlunya kontribusi mahasiswa untuk mengetahui sistem di sektor pemerintahan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelajaran di universitas seringkali tidak memberikan perhatian yang cukup besar pada topik pembiayaan keuangan daerah dan penganggaran publik. Sebagian besar materi pelajaran masih berfokus pada sektor privat dan belum membahas secara menyeluruh mekanisme, peraturan, dan dinamika penganggaran pemerintah daerah. Mahasiswa mungkin tidak tahu tentang sistem penganggaran pemerintah daerah karena adalah aset intelektual yang akan mengisi posisi penting dalam sektor swasta dan pemerintahan. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa kurang memahami keuangan, terutama tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan penganggaran. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang kesiapan untuk bekerja di dunia kerja yang semakin menuntut pemahaman lintas sektor, termasuk sektor publik (Muasyaroh & Yoga, 2025). Oleh karena itu, penelitian penting untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa tahu tentang perkembangan penganggaran pemerintah daerah. Penelitian ini dapat mengetahui seberapa banyak mahasiswa tahu tentang hal itu dan apa yang memengaruhinya.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perguruan tinggi mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, khususnya di sektor publik. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk membuat strategi literasi fiskal yang ditujukan untuk mahasiswa. Dengan latar belakang ini, penelitian ini berfokus pada mengevaluasi apa yang diketahui mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen tentang perubahan dalam penganggaran pemerintah daerah. Diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan keuangan publik dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan profesional di masa depan.

LANDASAN TEORI

Theory Of Planned Behavior

Teori psikologi sosial yang diciptakan oleh Icek Ajzen disebut Theory of Planned Behavior (TPB). TPB biasanya digunakan untuk menjelaskan perilaku individu yang didasarkan pada niat (intention) untuk melakukan suatu tindakan. TPB dapat berfungsi sebagai kerangka teoretis dalam penelitian berjudul "Analisis Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Mengenai Perkembangan Penganggaran Pemerintah Daerah" untuk memahami bagaimana pandangan, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi pengetahuan dan minat mahasiswa terhadap masalah penganggaran di sektor publik. Pertama, sikap terhadap perilaku, atau sikap terhadap perilaku, menunjukkan seberapa penting bagi mahasiswa untuk memahami penganggaran pemerintah daerah. Jika mahasiswa percaya bahwa memahaminya bermanfaat bagi

karir dan pendidikan, lebih tertarik untuk mempelajarinya lebih jauh. Sudut pandang ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman akademik, informasi yang ditemukan di media, dan partisipasi dalam diskusi atau proyek keuangan publik. Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang ada di lingkup organisasi (Wulaningsih, R., & Asriati, N, 2024).

Kedua, norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan mahasiswa untuk memahami penganggaran daerah dengan baik karena tekanan dari guru, teman sebaya, dan lingkungan kerja. Mahasiswa cenderung berperilaku sesuai ekspektasi sosial jika percaya bahwa orang penting di sekitarnya mengharapkan memahami masalah ini. Dalam hal ini, dorongan institusi pendidikan tinggi dan kurikulum pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk standar tersebut. Ketiga, persepsi kontrol perilaku juga dikenal sebagai "persepsi kontrol perilaku" terkait dengan kepercayaan mahasiswa tentang kemampuan untuk memahami dan mengikuti perkembangan anggaran pemerintah daerah. akan lebih termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan jika merasa memiliki akses ke sumber belajar yang cukup dan kemampuan intelektual. Oleh karena itu, TPB menjelaskan bahwa keinginan mahasiswa untuk memahami penganggaran daerah dipengaruhi oleh persepsi tentang kemudahan atau kesulitan melakukannya. Dengan menggunakan kerangka TPB ini, penelitian dapat menemukan komponen psikologis yang memengaruhi tingkat pengetahuan mahasiswa secara lebih sistematis dan teoritis.

Pengetahuan Mahasiswa

Mahasiswa akuntansi dan manajemen diharapkan menjadi sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan dan pengelolaan publik. Studi "Analisis Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Mengenai Perkembangan Penganggaran Pemerintah Daerah" membahas bagaimana mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan praktik penganggaran di sektor pemerintahan daerah. Pengetahuan ini mencakup teori dasar penganggaran dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Permendagri yang mengatur penyusunan APBD, dan penerapan sistem keuangan berbasis digital. Penelitian ini diperkuat oleh Sari et al. (2024) yang membahas perlunya pengetahuan individu terhadap rasio keuangan pemerintah. Mahasiswa akuntansi dididik untuk pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan, termasuk pemahaman tentang penganggaran sektor publik. Pada saat yang sama, mahasiswa manajemen memiliki pandangan tentang pengambilan keputusan dan perencanaan strategis yang berkaitan dengan cara anggaran disusun, dialokasikan, dan digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, memahami penganggaran pemerintah daerah dari perspektif teknis dan manajerial sangat penting bagi keduanya. Namun demikian, kurikulum sekolah, metode pengajaran, pemaparan masalah pemerintahan yang sebenarnya, dan pengalaman praktik seperti magang atau proyek simulasi anggaran dapat sangat memengaruhi pengetahuan siswa. Mahasiswa mungkin tidak tahu banyak tentang penganggaran daerah jika kurikulum tidak membahas sektor publik. Agar institusi pendidikan dapat menyesuaikan materi ajar dengan tuntutan dunia kerja dan profesionalisme di sektor pemerintahan, hal ini menjadi penting untuk diteliti. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kesiapan lulusan untuk menghadapi tantangan kerja di sektor publik dengan melihat tingkat pengetahuan mahasiswa tentang pengembangan penganggaran pemerintah daerah. Pengetahuan yang baik akan meningkatkan pemahaman kritis tentang transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Penelitian juga dapat berfungsi sebagai dasar evaluasi bagi perguruan tinggi untuk memperbaiki kurikulum lebih relevan dan kontekstual dengan perubahan kebijakan keuangan daerah di Indonesia.

Perkembangan Penganggaran

Penganggaran pemerintah daerah Indonesia telah mengalami banyak transformasi, terutama sejak era reformasi dan desentralisasi fiskal. Sistem penganggaran daerah telah berkembang untuk menjadi lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis kinerja. telah berkembang dari sudut pandang sentralistik dan administratif. Dalam penelitian "Analisis Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Mengenai Perkembangan Penganggaran Pemerintah Daerah", perubahan ini menjadi subjek penting yang harus dipahami oleh mahasiswa dapat menyesuaikan kemampuan akademik dengan perubahan kebijakan publik saat ini. Penerapan penganggaran berbasis kinerja juga dikenal sebagai penganggaran berbasis kinerja menekankan hubungan antara alokasi anggaran dan pencapaian hasil atau output tertentu. Penganggaran sekarang fokusnya tidak hanya pada jumlah dana yang dialokasikan, tetapi juga seberapa efektif dan efisien uang itu digunakan. Selain itu, peraturan baru, seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memengaruhi cara pemerintah daerah membuat dan mengelola anggaran. Perubahan-perubahan inilah yang membuat proses pembelajaran di institusi pendidikan tinggi harus disesuaikan. Digitalisasi memainkan peran penting dalam pengembangan sistem penganggaran. Aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem nasional seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) telah dimulai digunakan oleh pemerintah daerah saat ini. Digitalisasi meningkatkan transparansi, mempercepat proses birokrasi, dan mengurangi kemungkinan penyimpangan anggaran. Sebagai calon profesional di sektor publik dan privat, mahasiswa akuntansi dan manajemen harus memahami dampak dari kemajuan digital dapat berkontribusi pada tata kelola keuangan yang lebih canggih dan efektif. Khansa, I. (2025) juga membahas pentingnya peranan keuangan dan penganggaran untuk perkembangan biaya di sektor pemerintah. Oleh karena itu, memahami bagaimana penganggaran pemerintah daerah berkembang sangat penting baik secara teoritis maupun praktis yang memahami perubahan paradigma penganggaran akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja, terutama yang terlibat dalam konsultasi, perencanaan daerah, atau keuangan public (Sitanggang, R., & Fadli, U. M. D., 2024). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang perubahan tersebut dan menemukan komponen yang dapat memengaruhi pemahaman, termasuk akses informasi, pengalaman, dan akademik.

Hipotesis

Perbedaan tingkat pengetahuan antara mahasiswa program studi Akuntansi dan Manajemen berdampak signifikan pada pemahaman tentang kemajuan penganggaran pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang akademik yang berbeda dapat memengaruhi pemahaman mahasiswa tentang konsep, prosedur, dan perilaku anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Mahasiswa akuntansi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang regulasi anggaran dan teknik keuangan, sementara mahasiswa manajemen mungkin lebih fokus pada strategi dan pengambilan keputusan. Pengetahuan yang luas memberikan penilaian yang tidak sama antar individu (Ramadhani, G., Daryanto, E., & Restu, 2024). Oleh karena itu, perbedaan ini dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pemahaman yang dimiliki masing-masing kelompok tentang pengembangan dan pelaksanaan sistem penganggaran di sektor publik.

H1: Perbedaan tingkat pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan penganggaran dan pembiayaan pemerintah daerah.

Pengetahuan mahasiswa tentang perkembangan penganggaran pemerintah daerah sangat

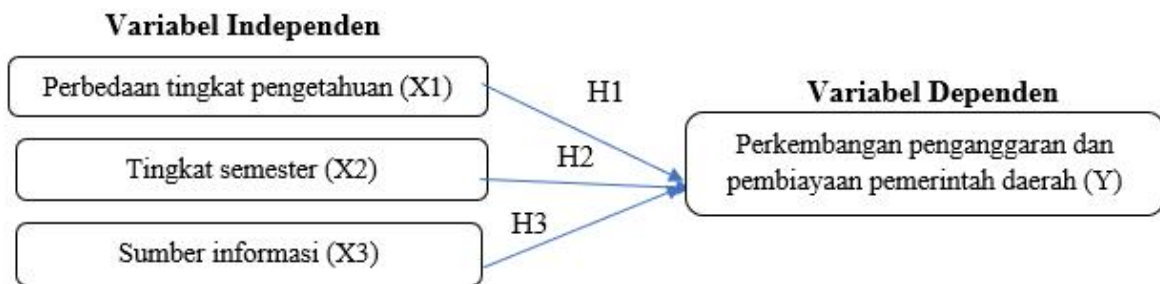
dipengaruhi oleh tingkat semester. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat semester, semakin banyak materi kuliah, pengalaman akademik, dan paparan terhadap masalah nyata, termasuk sistem anggaran publik. Pada semester akhir, mahasiswa biasanya mengikuti kursus yang relevan seperti akuntansi sektor publik, manajemen keuangan daerah, atau kebijakan publik, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana anggaran pemerintah daerah dijalankan. Teken et al. (2024) di Denpasar juga membahas adanya perkembangan pengetahuan sesuai dengan usia yang dijalani. Dengan demikian, hipotesis ini menguji semester kuliah mempengaruhi pengetahuan mahasiswa tentang pengelolaan keuangan daerah.

H2: Tingkat semester berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap perkembangan penganggaran dan pembiayaan pemerintah daerah.

Semakin beragam dan relevan sumber informasi yang diakses oleh mahasiswa, semakin memahami masalah aktual dalam penganggaran daerah. Literatur memperluas pemahaman konseptual dan praktis, kursus memberikan dasar teoritis, dan seminar memberikan pandangan praktis dari para ahli. Teguh et al. (2025) juga membahas perlunya informasi sebagai perkembangan kebijakan dalam pembiayaan. Palupi, R. M., & Fathah, R. N. (2024) juga membahas informasi pengelolaan keuangan di pemerintah daerah harus berjalan secara efektif. Oleh karena itu, dianggap penting untuk menggunakan berbagai sumber informasi untuk membentuk dan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang dinamika dan kebijakan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

H3: Sumber informasi (kuliah, media, seminar, dan literatur) berpengaruh signifikan terhadap perkembangan penganggaran dan pembiayaan pemerintah daerah.

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Gambar 1 menjelaskan kerangka penelitian yaitu model penelitian yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari perbedaan tingkat pengetahuan (X1), tingkat semester (X2), dan sumber informasi (X3), yang masing-masing diasumsikan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu perkembangan penganggaran dan pembiayaan pemerintah daerah (Y).

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan memeriksa tingkat pengetahuan mahasiswa program studi Akuntansi dan Manajemen tentang perubahan penganggaran pemerintah daerah. Metode ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan gambaran numerik dan statistik tentang tingkat pengetahuan responden tentang subjek yang dikaji. Penelitian ini melibatkan semua mahasiswa Akuntansi dan

Manajemen S1 aktif di perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel dari 63 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan secara online menggunakan platform seperti Google Forms. Kuesioner terdiri dari dua bagian utama yaitu (1) data demografis responden, termasuk informasi usia, semester dan lokasi dan (2) pernyataan yang mengukur pengetahuan responden tentang konsep dasar, peraturan, mekanisme, dan perubahan terkini dalam penganggaran pemerintah daerah. Dimulai dari "sangat tidak tahu" hingga "sangat tahu", kuesioner menggunakan skala lima poin Likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Gender

Gender	Jumlah
Pria	24
Wanita	39
Total	63

Sumber: Data diolah (2025)

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan dalam Tabel 1. Dari 63 responden penelitian, 24 (38%) adalah pria dan 39 (62%) adalah wanita. Ini menunjukkan bahwa responden perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Gender dalam penelitian ini dapat mencerminkan demografi organisasi atau instansi tempat penelitian dilakukan. Mungkin dominasi responden wanita menunjukkan bahwa mayoritas karyawan di lingkungan tersebut perempuan, terutama di sektor pemerintahan atau pelayanan publik, proporsi wanita biasanya lebih besar. Hal ini dapat memengaruhi bagaimana hasil penelitian diinterpretasikan, terutama jika ada perbedaan perspektif atau metode berdasarkan gender. Berdasarkan gambaran ini dapat mempertimbangkan kemungkinan bias gender saat melakukan analisis lebih lanjut bahwa penelitian tetap di dominasi oleh wanita.

Tabel 2 Umur

Umur	Jumlah
17-25 tahun	48
25-30 tahun	8
>30 tahun	7

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 2 menunjukkan bagaimana responden didistribusikan berdasarkan kelompok usia. Kelompok dengan responden terbanyak adalah yang berusia 17 hingga 25 tahun, dengan 48 orang. Kelompok berikutnya adalah yang berusia 25 hingga 30 tahun, dengan 8 orang, dan yang terakhir adalah yang berusia di atas 30 tahun. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berasal dari kelompok usia muda. Penelitian ini kemungkinan besar melibatkan mayoritas responden dari kelompok usia 17 hingga 25 tahun. Hal ini dapat mencerminkan demografi unit kerja atau instansi tempat penelitian dilakukan, di mana tenaga kerja usia muda lebih banyak.

Tabel 3 Lokasi

Lokasi	Jumlah
Jakarta	12
Bogor	11
Depok	6
Tangerang	20

Bekasi	14
--------	----

Sumber: Data diolah (2025)

Distribusi responden berdasarkan tempat tinggal atau tempat kerja ditunjukkan dalam Tabel 3. Data menunjukkan bahwa jumlah responden tersebar di lima wilayah: Tangerang (20 responden), Bekasi (14 responden), Bogor (11 responden), Jakarta (12 responden), dan Depok (6 responden). Wilayah Tangerang memiliki jumlah responden terbanyak, sementara Depok memiliki jumlah responden terkecil. Keberagaman geografis responden penelitian ditunjukkan oleh pembagian lokasi ini. Penyebaran ini menunjukkan bahwa penelitian ini mencakup banyak wilayah, termasuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Kondisi ini memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih representatif tentang variabel yang diteliti, terutama dengan mempertimbangkan perbedaan sosial, ekonomi, dan administratif yang ada di antara wilayah.

Tabel 4 Semester

Semester	Jumlah
1-2	8
3-4	19
5-6	14
7-8	17
>8	5

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 4 menunjukkan distribusi responden berdasarkan semester. Data menunjukkan bahwa yang paling banyak dari berasal dari semester 3–4, sebanyak 19 orang; yang paling sedikit berasal dari semester 7–8, sebanyak 17 orang, dan yang paling sedikit berasal dari semester 1–2, sebanyak 8 orang, dan yang paling banyak berasal dari semester 5–6, sebanyak 14 orang. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada di tingkat menengah hingga akhir studi. Jumlah responden yang dominan dari semester 3 hingga 8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengalaman yang cukup dengan kegiatan akademik dan organisasi kampus. Selain itu, tingkat semester ini menunjukkan bahwa responden telah mengikuti berbagai mata kuliah inti dan kemungkinan besar lebih memahami topik atau masalah yang menjadi fokus penelitian. Ini menjadi relevan saat penelitian menilai persepsi, sikap, atau pengalaman, yang memerlukan pemahaman konseptual dan praktis. Mahasiswa di semester awal mungkin belum memiliki pemahaman yang lengkap tentang dinamika akademik dan institusional. Sebaliknya, siswa di semester akhir atau setelah semester delapan dapat memberikan tanggapan yang lebih cermat dan menyeluruh. Akibatnya, keragaman tingkat semester meningkatkan validitas dan kedalaman data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

Tabel 5 Statistik Deskriptif

Var.	Mean	Std.Dev	Min	Max
X1	4.334152	.3599855	3	5
X2	4.486255	.3415617	3	5
X3	4.530044	.3029221	3	5
Y	4.379920	.3459522	3	5

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5 menjelaskan empat variabel penelitian (X1, X2, X3, dan Y) memiliki nilai rata-rata (mean) 4,33 dan standar deviasi 0,36; variabel X2 memiliki nilai rata-rata 4,49 dan standar deviasi 0,34, yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap variabel ini tinggi dan relatif

homogen. Selain itu, variabel X3 menerima nilai rata-rata tertinggi di antara semua variabel, dengan nilai 4,53 dan standar deviasi 0,30. Sementara itu, variabel Y, yang merupakan variabel dependen, menerima nilai rata-rata 4,38 dengan standar deviasi 0,35, yang menunjukkan bahwa responden menilai kinerja yang diukur dengan baik dan memiliki persepsi yang seragam. Semua variabel memiliki nilai minimum dan maksimum yang sama, yaitu 3–5, yang menunjukkan bahwa semua tanggapan responden berada dalam kategori yang cukup baik hingga sangat baik, tanpa adanya jawaban yang sangat rendah.

Tabel 6 Hasil

Var.	Mean	Std.Err	P>t	Sig.	Res.
X1	1.549852	.1358795	0.000	(+)	Effect
X2	.3597110	.1628535	0.035	(+)	Effect
X3	.0575498	.2987921	0.053	(-)	No Effect

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 6 menjelaskan variabel independen (X1, X2, dan X3) mempengaruhi variabel dependen penelitian. Hasil uji regresi disajikan dalam Tabel 6. Koefisien regresi tak terstandarkan, yang menunjukkan besaran pengaruh setiap variabel, diwakili oleh kolom rata-rata. Sementara itu, Std.Err menunjukkan simpangan baku koefisien, yang berarti bahwa semakin kecil nilainya, semakin akurat estimasi tersebut. Probabilitas (p-value) hasil uji t disimpan dalam kolom $P > t$; p-value di bawah ambang 0,05 biasanya dianggap sebagai indikasi bahwa koefisien berbeda signifikan dari nol. Arah pengaruh ditunjukkan oleh kolom Sig.: tanda (+) menunjukkan efek positif dan tanda (-) menunjukkan efek negatif. Terakhir, Res. membahas apakah variabel Variabel X1 memiliki koefisien sebesar 1,550 dengan std. error 0,136 dan p-value 0,000. Nilai p-value yang jauh di bawah 0,01 menunjukkan signifikansi yang sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependennya. Secara praktis, setiap peningkatan satu unit pada X1, peningkatan tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual diproyeksikan akan meningkatkan kinerja (atau variabel terikat lain yang diteliti) sebesar 1,55 unit, asalkan variabel lainnya konstan. Ini adalah bukti kuat bahwa X1 adalah komponen penting dari model. Berdasarkan nilai koefisien 0,360, tingkat kesalahan standar 0,163, dan p-value 0,035, variabel X2 juga menunjukkan efek positif yang signifikan. P-value di bawah 0,05 menunjukkan bahwa kompetensi SDM (atau konstruksi X2 dalam konteks studi) masih merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja, meskipun efeknya tidak sebesar X1. Peningkatan satu unit pada X2 dikaitkan dengan kenaikan sekitar 0,36 unit pada variabel dependen, sehingga peningkatan kualitas SDM atau kapasitas organisasi tetap relevan. X3, yang menunjukkan pemanfaatan TI, memiliki koefisien positif kecil (0,058) dan std. error relatif besar (0,299), dengan p-value 0,053. Ini berbeda dengan dua variabel sebelumnya. Dengan nilai yang sedikit melampaui batas signifikansi konvensional (0,05), kesimpulan adalah "Tidak ada efek". Secara statistik, ada bukti yang tidak cukup untuk menunjukkan bahwa X3 benar-benar memengaruhi variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi digitalisasi mungkin perlu dievaluasi lagi, atau mungkin ada variabel pemoderasi atau kontekstual lain yang belum dimasukkan ke dalam model.

Tabel 7 VIF

Mean VIF	2.36
-----------------	------

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 7 menjelaskan tentang rata-rata nilai VIF yaitu 2,36 yaitu berada dibawah skor 10. Hal ini memberikan penjelasan bahwa penelitian ini bebas dari multikolinearitas, sehingga hasil dari penelitian ini akurat.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan mahasiswa program studi Akuntansi dan Manajemen tentang perubahan dalam penganggaran pemerintah daerah, termasuk peraturan, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, dan penggunaan teknologi informasi dalam proses penganggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa secara umum memahami prinsip-prinsip dasar penganggaran publik dengan baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan kurikulum yang telah memasukkan masalah sektor publik yang sebenarnya ke dalam proses pembelajaran. Namun, mahasiswa akuntansi dan manajemen tidak sama dalam pengetahuannya. Mahasiswa akuntansi biasanya lebih memahami elemen teknis penganggaran, seperti siklus anggaran, penyusunan APBD, dan undang-undang yang melandasinya. Sebaliknya, mahasiswa manajemen lebih memahami elemen strategis dan pengambilan keputusan penganggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa berbagai metode pembelajaran yang digunakan di masing-masing program studi turut mempengaruhi perspektif dan pemahaman siswa tentang masalah penganggaran daerah. Selain itu, tingkat semester siswa, pengalaman magang atau praktik lapangan, dan kemampuan untuk mendapatkan akses ke sumber informasi seperti seminar, kuliah tamu, dan media digital berkontribusi pada peningkatan pengetahuan. Mahasiswa yang telah mengikuti kursus sektor publik dan aktif terlibat dalam pengembangan kebijakan pemerintah menunjukkan pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual dan aplikatif sangat memengaruhi pemahaman siswa tentang masalah fiskal daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa tahu banyak tentang penganggaran pemerintah daerah, tetapi masih ada ruang untuk lebih baik, terutama dalam kaitannya dengan teori dan praktik. Studi kasus APBD nyata, pelatihan penggunaan sistem informasi keuangan daerah, dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah adalah beberapa contoh bagaimana lembaga pendidikan harus lebih terlibat dalam program berbasis pengalaman. Hal ini penting untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami teori tetapi juga dapat menangani masalah praktis dalam tata kelola keuangan sektor publik.

DAFTAR REFERENSI

- Khansa, I. (2025). Pengaruh kualitas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), akurasi perencanaan kas, dan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pada Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 7(2), 93–102. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1190>
- Muasyaroh & Yoga (2025). Dampak Literasi, Pencatatan, Dan Penganggaran Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Ekuilnومي*, 7(2), 535-546. <https://doi.org/10.36985/jv2gcn95>
- Palupi, R. M., & Fathah, R. N. (2024). Analisis pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di BPKAD Kota Magelang periode 2018–2022. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 12(2). <https://doi.org/10.59330/ojsmadani.v12i2.192>
- Ramadhani, G., Daryanto, E., & Restu. (2024). Analisis perencanaan dan penganggaran program kesiswaan berdasarkan misi di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan. *Jurnal Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4). <https://doi.org/10.23969/jp.v9i4.19030>
- Rowanda & Suriadi (2025). Kontribusi Mahasiswa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

- Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Abdi Anjani*, 3(1), 237–244. <https://doi.org/10.29303/anjani.v3i1.2170>
- Sari et al. (2024). Analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) Desa Suato Lama Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin berdasarkan ratio financial independence, effectiveness, efficiency periode 2021–2023. *Jurnal Maneksi*, 13(4). <https://doi.org/10.31959/jm.v13i4.2772>
- Sitanggang, R., & Fadli, U. M. D. (2024). Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada UMKM Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang. *Jurnal Sains Student Research*, 2(4). <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2003>
- Teguh et al. (2025). Studi Kelayakan dan Kebijakan Pembiayaan dalam Pengembangan Program Pendidikan. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 611–628. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4475>
- Teken et al. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 111–123. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4419>
- Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757>